

**IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT
KEBUTUHAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Klas II B Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YUDISTIRA AJI PRANAJAYA

C100150119

**PROGRA STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI *ASSESSMENT* RISIKO DAN *ASSESSMENT*
KEBUTUHAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Klas II B Klaten)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YUDISTIRA AJI PRANAJAYA

C100150119

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Muchammad Iksan, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *ASSESSMENT* RISIKO DAN *ASSESSMENT*
KEBUTUHAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Klas II B Klaten)**

OLEH

YUDISTIRA AJI PRANAJAYA

C100150119

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 22 Februari 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Muchammad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

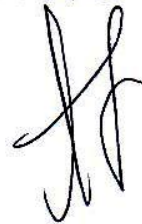
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Februari 2020

Penulis



YUDISTIRA AJI PRANAJAYA

C100150119

**IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT
KEBUTUHAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Klas II B Klaten)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Assessment risiko dan Assessment kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sosiologis atau non-doktrinal yang dijelaskan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Data dalam penelitian ini dianalisis dan dijelaskan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Assessment risiko dan Assessment kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten belum sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengharuskan pelaksanaan Assessment dilakukan oleh seorang assessor yang telah mendapatkan sertifikasi dari program pelatihan assessor yang dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan Assessment risiko dan Assessment kebutuhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraannya adalah belum adanya pegawai yang menjabat sebagai assessor dikarenakan minimnya jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten.

Kata kunci: assessment, assessor, lembaga pemasyarakatan.

Abstract

This research aimed at identifying the implementation and obstacle of the risk assessment and necessity assessment for the prisoners in Correctional Institution Class II B Klaten. This research was sociologic empirical law research or non-doctrinal which was explained by using description. The data in this research were primary and secondary data. The techniques to collect the data were literature review, observation, and interview. The data of this research were analyzed and explained by using qualitative method. The research result showed that the implementation of risk and necessity assessment for the prisoners in Correctional Institution Class II B Klaten were not suitable with the Ministry of Law and Human Rights rules Number 12 year 2013. The rule required that the assessments should be conducted by the certified assessor from the assessor training program which was held by the Director General of Correctional Institution. The obstacle in implementing risk and necessity assessment in Correctional Institution Class II B Klaten were come from the employee unavailability as the assessor since the officer the institution were insufficient in terms of number.

Key words: assessment, assessor, correctional institution

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga digunakan untuk mengantisipasi penyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat, dua diantaranya adalah penyimpangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang mana dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsekuensi dari penyimpangan tindak pidana tersebut adalah pemberian sanksi-sanksi orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana ada beberapa sanksi yang dapat diberikan jika seseorang melanggar hukum. Hukum pidana di Indonesia berpedoman pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara, dimana pelaku tindak pidana yang dikenakan pidana penjara disebut dengan narapidana. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 Angka 7, yang berbunyi “*Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)*”. Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina para narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat.

Pidana penjara sendiri di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperlihatkan hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk sosial.

Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan tepat dan efektif agar alasan dan tujuan pembinaan tersebut dapat benar dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan.

Mekanisme *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas. Pada tahun 2013 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dengan adanya peraturan ini diharapkan pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga setelah narapidana telah selesai menjalani masa pidana di Lapas, mereka telah siap kembali berbaur dengan masyarakat.

2. METODE

Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris sosiologis / non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 implementasi *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten terdiri dari tahanan dewasa laki-laki, tahanan dewasa perempuan, narapidana dewasa laki-laki, narapidana dewasa perempuan, dan narapidana anak laki-laki. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan ini periode Oktober 2019 ada 301 orang.

Penggolongan Narapidana menurut lama pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, yaitu: Register B.I, narapidana yang dijatuhi pidana satu tahun keatas. Register B.IIA, narapidana yang dijatuhi pidana 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Register B.IIB, narapidana yang dijatuhi pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan. Register B.III/S, narapidana yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda atau subsider.

Sedangkan untuk penggolongan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, yaitu: Register A.I, Tahanan Kepolisian. Register A.II, Tahanan Kejaksaan. Register A.III, Tahanan Hakim Pengadilan Negeri. Register A.IV, Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi. Register A.V, Tahanan Hakim Mahkamah Agung.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

STATUS	B.I	B.IIA	B.IIB	B.III/S	A.I	A.II	A.III	A.IV	A.V	JML
NAPI	199	39	3	6	-	-	-	-	-	247
TAHANAN	-	-	-	-	-	8	45	-	1	54
										301

Sumber : Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan Oktober 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 tahun tercatat paling banyak, dengan jumlah 199 orang, yang dijatuhi pidana 3 bulan sampai 12 bulan sejumlah 39 orang, yang dijatuhi pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan sejumlah 3 orang, yang dijatuhi pidana kurungan sejumlah 6 orang, tahanan Kejaksaan sejumlah 8 orang, tahanan Pengadilan Negeri sejumlah 45 orang, Tahanan Mahkamah Agung sejumlah 1 orang. Jika

melihat tabel di atas hal ini jelas bahwa sebagian besar dari mereka telah melakukan perbuatan pidana yang tidak ringan sehingga harus mendapat masa pidana yang relatif lama.

Tabel 2. Jumlah Narapidana dan Anak Didik Berdasarkan jenis
Kejahatan

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP / UU	L	P
1	Mata Uang	244 – 251	3	-
2	Kesusilaan	281 – 297	1	-
3	Perjudian	303	3	-
4	Pembunuhan	338 – 350	3	-
5	Penganiayaan	351 – 356	11	-
6	Pencurian	362 – 364	54	-
7	Penggelapan	372 – 375	8	-
8	Penipuan	378 – 395	19	-
9	Penadahan	480 – 481	1	-
10	Narkotika	UU No. 9/1976, 5/1976 & 22/1997	75	1
11	Korupsi	UU RI No. 31/1999	5	1
12	Lain-lain		15	-
13	Teroris	UU 13/2001 – UU 15/2003	1	-
14	Kekerasan Anak	UU No. 35/2014	41	2
15	Kesehatan	UU No. 36/2009	3	-
JUMLAH			243	4
JUMLAH KESELURUHAN			247	

Sumber : Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan Oktober
2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus narkoba menduduki posisi tertinggi dengan jumlah kasus 76, diikuti dengan kasus pencurian sejumlah 54 kasus, kasus kekerasan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak) sejumlah 43 kasus, penipuan sejumlah 19 kasus, lain-lain sejumlah 15 kasus, penganiayaan sejumlah 11 kasus, penggelapan sejumlah 8 kasus, korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sejumlah 6 kasus, selanjutnya kasus pembunuhan, perjudian, mata uang, dan izin edar alat kesehatan (Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang masing-masing sejumlah 3 kasus, kasus penadahan, kesusilaan, dan terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) masing-masing sejumlah 1 kasus.

Tolak ukur keberhasilan dari pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah dilihat dari perilaku narapidana itu sendiri, baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan tersebut agar narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri kearah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Ketidaktepatan dalam melakukan pembinaan dapat mengakibatkan perilaku narapidana tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat memicu pengulangan tindak pidana.

Tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten terdapat empat tahap, yaitu : Tahap pertama disebut dengan Tahap Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dimulai sejak berstatus narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Tahap kedua dimulai dari 1/3 (satu per tiga) sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya. Setelah narapidana melakukan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya di Blok C maka segera diadakan siding Tim Pengamat Pemasyarakatan kembali mengenai peningkatan program.

Tahap ketiga disebut dengan tahap asimilasi, dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan membaurkan narapidana / anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Tahap keempat dimulai dari 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan bebas masa pidana atau bisa dikatakan tahap akhir dari proses pembinaan narapidana. Apabila proses pembinaan dari tahap pertama sampai tahap ketiga

berjalan dengan baik atau setelah menempuh 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, maka narapidana tersebut dapat diintegrasikan kepada masyarakat di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan berupa cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.

Dapat diketahui bahwa metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sebagai berikut: Metode Gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan, metode keamanan (*security*). Sistem *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

Assessment risiko dilakukan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan mengetahui seberapa tinggi rendahnya tingkat risiko seorang warga binaan pemasyarakatan melakukan perbuatan pidana kembali dikemudian hari. Selain itu, proses *Assessment* kebutuhan juga penting dilakukan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan suatu pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan tepat sasaran. Sistem pembinaan yang diberikan sesuai dengan masing-masing warga binaan pemasyarakatan yang bergantung pada kebutuhannya.

Proses *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan dilakukan oleh *Assessor*, pengertian *assessor* itu sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, yaitu “*Assessor* adalah petugas yang melakukan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan terhadap Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.” Seorang *assessor* sendiri adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang *assessor* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

3.2 Kendala dalam Pelaksanaan *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi hukum. Keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaat hukum, keadilan hukum.

Selain peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempegaruhi penegakan hukum yaitu (Soekanto dan Abdullah, 1982): faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik positif maupun pengaruh yang bersifat negatif.

Faktor pertama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten adalah belum adanya petugas yang menjadi assessor karena terkendala Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten yang sangat terbatas. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah petugas pemasyarakatan. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada sehingga petugas yang telah mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang *assessor* tidak diangkat menjadi seorang *assessor*. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya rangkap jabatan, adanya rangkap jabatan dapat menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai *assessor* menjadi tidak focus dan optimal.

Selama ini dasar dalam menentukan pembinaan bagi narapidana dilakukan dengan wawancara sederhana, pendataan, penilaian dan pemantauan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wali Pemasyarakatan dan kemudian hasil wawancara, pendataan, penilaian dan pemantauan tersebut dilaporkan ke bagian

Bimbingan Narapidana / Anak Didik & Kegiatan Kerja untuk selanjutnya dilakukan penanganan untuk narapidana tersebut. Penilaian dan pemantauan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan tidak hanya dilakukan pada awal masa pidana, namun sampai narapidana tersebut selesai menjalani pidananya. Penilaian dan pemantauan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan ini tetap dilaksanakan dengan baik meskipun tidak dilakukan oleh *assessor* sehingga diharapkan tetap memperoleh hasil yang maksimal guna menentukan pembinaan yang tepat bagi narapidana. Mengingat wali pemasyarakatan juga memiliki jabatan fungsional di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini berpengaruh pada waktu pelaksanaan wawancara, pendataan, penilaian dan pemantauan menjadi kurang maksimal karena petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan menjadi rangkap jabatan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten belum mengimplementasikan dengan tepat mekanisme *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan bagi narapidana yang sisa masa pidananya lebih dari satu tahun dan dilakukan pada masa awal pidana dan juga sebelum pelaksanaan asimilasi. Tetapi pada pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten baru mencapai setengah dari jumlah warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya dilakukan *Assessment*. Pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan pun hanya dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui wawancara sederhana, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 yang mengharuskan pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan dilakukan oleh *assessor*.

Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten yaitu: Belum adanya petugas pemasyarakatan yang diangkat sebagai *assessor* karena minimnya sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Terdapat rangkap jabatan, petugas pemasyarakatan yang menjabat sebagai pejabat fungsional di Lembaga Pemasyarakatan juga menjabat sebagai wali pemasyarakatan, hal ini menyebabkan tidak optimal nya pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan.

4.2 Saran

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sebaiknya mengimplementasikan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan *Assessment* bisa lebih maksimal dan tepat sasaran.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sebaiknya menunjuk lebih banyak petugas pemasyarakatan untuk mengikuti pelatihan *assessor* sekaligus menjabat sebagai *assessor* sesuai dengan peraturan yang berlaku guna untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan bagi warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Panjaitan, Petrus Iwan dan Simorangkir, Pandapotan. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Chazawi, Adami Juli. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.